

BAHASA JAWA

DAN PERSPEKTIF PENGEMBANGANNYA

Prosiding Seminar Nasional Pra-Kongres Bahasa Jawa VI 2016
11 Juni 2015 diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Kebudayaan Nasional
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
Bekerjasama dengan
Balai Bahasa Yogyakarta dan Asosiasi Peneliti Bahasa Daerah DIY

Basa verbal menapa kemawon —klebet basa Jawi— namung saged wonten menawi wonten ingkang wicanten (IWI), ingkang kawicantenaken (IKAWI), saha wonten ingkang dipunwicanteni (IDIWI). Tiga-tiganipun menika tritunggal ingkang dados syarat mutlak.

Wontenipun IWI andadosaken basa anggadhahi *bleger* awujud ungel ingkang kaucapaken, ingkang jinisipun mawarni-warni, ingkang ing jagading ilmu basa (linguistik) kasebat “bentuk lingual” (*linguistic form*). Dene wontenipun IKAWI andadosaken basa anggadhahi *teges* utawi *makna*, inggih menika idheasining menapa kemawon ingkang saweg kawicantenaken. Ingkang kasebat “idheasi” inggih menika proses menggalihaken, nenimbang, ngangen-angen, nggagas, samukawis ingkang katindakaken dening akal-budi; ingkang ing jagading ilmu basa, panggagas wau kasebat “makna lingual” (*linguistic meaning*). Jumbuhing bleger kaliyan *teges* mujudaken menapa ingkang kawastanan “satuan lingual” (*linguistic unit(s)*), ingkang jinisipun inggih mawarni-warni; ing antawisipun, ingkang akrab tumrapping kesadharanipun para ingkang wicanten —pandarbe basa— inggih menika “tembung” lan “ukara”.

Kontributor Makalah

Sudaryanto (PPS Universitas Widya Dharma Klaten)
Sudartomo Macaryus (LPKN Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta)
Tri Mastoyo Jati Kesuma (FIB Universitas Gadjah Mada)
Subardi Agan (Universitas Nusantara PGRI Kediri)
Herlina Setyowati (FKIP Universitas Muhammadiyah Purworejo)
Endang Nurhayati (FBS Universitas Negeri Yogyakarta)
Hery Prasetyo (FISIP Universitas Jember)



Diterbitkan oleh :
Lembaga Pengembangan Kebudayaan Nasional
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
bekerja sama dengan Balai Bahasa Yogyakarta



Penyunting:
Sudartomo Macaryus
Dhani Priyo Prabowo



BAHASA JAWA

DAN PERSPEKTIF PENGEMBANGANNYA

Prosiding Seminar Nasional Pra-Kongres Bahasa Jawa VI 2016
11 Juni 2015 diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Kebudayaan Nasional
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
Bekerjasama dengan
Balai Bahasa Yogyakarta dan Asosiasi Peneliti Bahasa Daerah DIY

Penyunting:
Sudartomo Macaryus
Dhanu Priyo Prabowo



BAHASA JAWA
DAN PERSPEKTIF PENGEMBANGANNYA

Prosiding Seminar Nasional Pra-Kongres Bahasa Jawa VI 2016

11 Juni 2015 diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan

Kebudayaan Nasional

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

Bekerjasama dengan

Balai Bahasa Yogyakarta dan Asosiasi Peneliti Bahasa Daerah DIY

Diterbitkan oleh

Lembaga Pengembangan Kebudayaan Nasional

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

bekerjasama dengan

Balai Bahasa Yogyakarta

2015

Jl. Batikan, Tuntungan UH III/1043 Umbulharjo Yogyakarta 55167

Telp. (0274) 375637, Fax.375637. E-mail: lpkn.ustjogja@gmail.com

viii + 130 hlm; 15.5 x 23 cm

ISBN : 978-602-70408-8-5

Penyunting:

Sudartomo Macaryus

Dhanu Priyo Prabowo

PENGANTAR PENYUNTING

AUTENTISITAS PENUTUR

Autentisitas merupakan gejala penampilan secara apa adanya, tulen, asli, dan dapat dipercaya. Dalam hal berbahasa, penutur pun cenderung menunjukkan autentisitas dan orisinalitas. Dalam berbagai kegiatan yang menggunakan medium bahasa, autentisitas dan orisinalitas menunjukkan kepribadian penuturnya. Generasi yang mengenal pelawak Gepeng tentu masih ingat ungkapannya yang terkenal, "Untung ada saya", Asmuni, "Hil yang mustahal", penyair Chairil Awar dengan "binatang jalang", dan Wiji Tukul dengan, "Hanya ada satu kata, lawan". Semua itu terbangun setelah melalui perjalanan panjang dan pergulatan yang berkaitan dengan proses kreatif masing-masing.

Dalam penggunaan bahasa Jawa, autentisitas memiliki kemungkinan terjadi secara personal, komunal, atau universal. Semua itu berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, dan sikap bahasa dan lingkungan alam, sosial, dan budayanya. Pengetahuan mengenai tata bahasa, kosa kata, dan gaya bahasa akan menentukan karakteristik penggunaan bahasa. Demikian juga pengalaman dan sikap bahasa penutur menjadi penentu karakteristik bahasa yang digunakannya. Keterbatasan dan kelimpahan akan membentuk autentisitas bahasa masing-masing penutur atau komunitas penutur yang tertentu.

Di Indonesia tidak pernah terjadi pembunuhan bahasa daerah secara sistematis, seperti yang terjadi di Perancis atau di Amerika.

Akan tetapi, ruang penggunaannya semakin terbatas. Hal tersebut diformulasikan secara verbal normatif dalam bentuk slogan dan undang-undang. Ajakan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, berakibat pada menitikutamakan bahasa asing dan bahasa daerah, termasuk bahasa Jawa. Hal tersebut mengingatkan pada pandangan Yoss Wibisono yang tertuang dalam bukunya *Saling Silang Indonesia Eropa* (2013). Dikatakannya bahwa Charles Adriaan van Ophuysen, pencipta ejaan bahasa Melayu baku bertujuan melebarkan kekuasaan Belanda ke seluruh Nusantara. Demikian juga pembakuan bahasa Indonesia, dimaknai sebagai pelenyapan kemajemukan bahasa, supaya rakyat penggunaannya dapat dikuasai. Melalui lembaga otoritas bahasa (sekarang Badan Bahasa) Orde Baru melakukan penindasan dan kesewenang-wenangan. Hal tersebut beralasan, karena bahasa sebagai media berpikir, berkomunikasi, dan berinteraksi.

Penutur bahasa daerah pun mencintai, mengagumi, dan menempatkan bahasa daerah sebagai identitas dan kekayaan Nusantara. Fenomena tersebut tampak pada gerakan yang menolak dihilangkannya bahasa daerah dari kurikulum 2013 dan disatukan dengan seni budaya. Semangat tersebut tampak dalam poster-poster yang diusung pada saat demo di Yogyakarta berikut.

- (1) Seni budaya tidak sama dengan bahasa daerah
- (2) Bahasa daerah nyawa Nusantara
- (3) Pembunuhan bahasa daerah sama dengan pembunuhan karakter bangsa
- (4) Menghilangkan bahasa daerah mengkhianati Pancasila dan UUD 1945

Keempat kalimat yang tertuang dalam spanduk tersebut secara umum merepresentasikan kecintaan bangsa Indonesia terhadap bahasa daerah dan menempatkan bahasa daerah sebagai identitas, karakter, dan pengakuan terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Autentisitas

Dalam acara Seminar Pra-Kongres Bahasa Jawa VI yang diselenggarakan LPKN UST, seorang peserta merespons penggunaan bahasa Jawa oleh penutur saat ini. Dikatakannya bahwa pengguna bahasa Jawa semakin berkurang penutur dan kualitasnya, hal ini sebagai tanda bahwa bahasa Jawa tidak berkembang tetapi semakin surut. Selanjutnya dikatakan bahwa penutur bahasa Jawa pada umumnya tidak konsisten. Berbahasa Jawa dicampur dengan bahasa lain. Contoh kata *prihatos* yang benar *prihatin*. Anak-anak muda menggunakan bentuk *piye bro?*

Tuturan seperti tersebut di atas kiranya merupakan ekspresi salah satu tipe penutur bahasa Jawa yang mendapatkan pengaruh dari bahasa lain (bahasa nasional, asing, atau daerah lain). Gejala tersebut dapat diminimalkan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan teladan. Ihwal keteladanan dikatakan dalam *Wulangreh* berikut.

(Kianthi) Yen wong anom pan wis tamtu, manut marang kang ngadhepi, yen kang ngadhep akeh bangsat, datan wurung bisa juti, yen kang ngadhep keh durjana, nora wurung bisa maling.

(Kinantih) 'bila orang muda sudah tentu, mengikuti yang dihadapi, bila yang dihadapi banyak orang yang tidak baik, pada akhirnya demikian jadinya, bila yang dihadapi banyak penjahat, pada akhirnya jadi pencuri'.

Masuknya bahasa lain ke dalam bahasa Jawa akibat adanya kontak bahasa dan yang memperkaya bahasa Jawa kiranya merupakan hal yang positif. Gejala tersebut memungkinkan penutur dapat menggunakan bahasa Jawa dengan nyaman dan tanpa beban psikologis, seperti takut disalahkan, takut dikatakan tidak tahu kesantunan, tidak menghormati orang tua, dan aneka ungkapan lain yang setipe.

Autentisitas penutur dengan karakteristik bahasanya yang khas dan konsisten kiranya justru menunjukkan identitas dan karakter

generasi penutur tersebut. Keragaman tipe penutur dengan bahasanya yang khas tersebut dalam dunia akademik menjadi lahan kajian dan penelitian yang akan menyemarakkan dunia akademik. Selain itu, terdeskripsikannya masing-masing tipe penutur secara menyeluruh menjadi salah dasar menentukan kebijakan bidang kebahasaan. Akan tetapi, ruang penggunaan bahasa standar perlu terus ditumbuhkan dan dikembangkan untuk memberi ruang ekspresi yang bergengsi.

Penyunting



DAFTAR ISI

Pengantar Penyunting	iii
Daftar Isi	vii
Basa Jawi Saha Perspektif Anggenipun Ngrembakakaken: Cathetan ngengingi Tigang Prakawis ingkang Kapiji, Katetepaken, lan Katemtokaken <i>Sudaryanto</i> ~ (PPs Universitas Widyadharma Klaten)	1
Maretisme: Sosialisasi Basa lan Budaya Jawi <i>Sudartomo Macaryus</i> ~ Lembaga Pengembangan Kebudayaan Nasional (LPKN) UST	16
Bahan Pengajaran Bahasa Jawa untuk Penutur Asing <i>Tri Mastoyo Jati Kesuma</i> ~ Fakultas Ilmu Budaya UGM	30
Eksistensi Macapat, Persoalan Bahasa dan Transformasi Teks <i>Subardi Agan</i> ~ Universitas Nusantara PGRI Kediri	35
Kekayaan Bahasa Jawa: Usaha Mengingatnkan yang Mungkin Mulai Terlupakan <i>Herlina Setyowati</i> ~ FKIP Universitas Muhammadiyah Purworejo	47
Fungsi Tingkat Tutur Bahasa Jawa dalam Lingkup Pendidikan Formal <i>Endang Nurhayati</i> ~ Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta	66
(Auto)Eksotisme (Ke/Pem)Bahasa(An): Menafsir Ulang Fragmentasi Politik Ruang Kultural <i>Hery Prasetyo dan Dien Vidia Rosa</i> ~ FISIP Universitas Jember	80

Lampiran	101
Lampiran 1	
Hasil Rapat Ketua Jurusan Bahasa Jawa, Balai Bahasa, Panitia Pengarah Seminar Prakongres Bahasa Jawa VI, dan LPKN UST	103
Lampiran 2	
Kongres Bahasa Jawa dan Oralitas	114
Lampiran 3	
Kongres Bahasa Jawa Visioner dan Revolusiner	118
Lampiran 4	
Hari Bahasa Ibu dan Kongres Bahasa Jawa	122
Lampiran 5	
“ <i>Inkubator</i> ” Bahasa Jawa	126



(AUTO)EKSOTISME (KE/PEM) BAHASA(AN): MENAFSIR ULANG FRAGMENTASI POLITIK RUANG KULTURAL

Hery Prasetyo dan Dien Vidia Rosa
FISIP Universitas Jember
heryprasetyo@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang praktik lokalitas bahasa Jawa, khususnya pada ruang-ruang *enclave* kultural. Pada *setting* yang terbentuk melalui pluralitas posisi dan akar kultural, subjek yang berbicara dan dialogisme kultur tampil secara ambivalen, bukan hanya pada peniadaan akar identitasnya melainkan pada situasi kekinian yang mengharuskan dirinya mentransformasi kesadaran. Pada titik tersebut, bahasa menampilkan bentuk transformasi kultural dan basis ekonomi-politik sang subjek. Sementara wilayah *enclave* menjadi spesifik ketika subjek menghadirkan dirinya pada keterbatasan naturalitas geografis, situasi sosial yang tertutup dan terpinggirkan. Wilayah *enclave* menjadi penanda titik terluar dari keterpusatan kuasa bahasa yang menciptakan kedisiplinan dan menandai adanya penampakan fragmentasi ruang jangkauan kekuasaan. Sementara disisi lain, bahasa yang tampil dalam kultur urban menjadi ruang pendisiplinan melalui sistem bahasa nasional. Kategori dan kontradiksi praktik kultural antara *enclave* dengan urban memunculkan persoalan bagaimana subjektivitas penutur bahasa menjadi bagian yang berserakan dalam relasi kultural yang membentuk praktik subjek penutur. Dengan *setting* politik kebahasaan, peneliti melihat situasi yang secara sistematis

mampu menciptakan ruang-ruang kebahasaan. Kuasa bahasa atas bahasa Jawa kemudian tidak lebih dari sekedar menjadi kategori kultural yang dikenali oleh sistem kebudayaan yang menjadi bagian dan mereproduksi posisi-posisi subjek yang berbicara. Dengan demikian, subjek tersebut menjadi bagian eksotisasi tradisi dan berhadapan dengan standarisasi negara atas kemungkinan munculnya pluralitas tradisi. Bagi peneliti hal tersebut bukan lagi persoalan bagaimana negara sebagai legitimator tradisi lokal mampu membatasi ruang gerak bahasa tetapi menjadi bagian dari bagaimana eksotisme tradisi dan bahasa ditempatkan pada persoalan kembalinya budaya sebagai kekuatan melawan dominasi kebahasaan.

Kata kunci: dominasi, enclave, eksotisme, hegemoni, politik bahasa lokal.

Bahasa dan Kuasa: Titik Awal Permulaan (Pe)ruang(an)

Bahasa dalam konteks teoretik menjadi persoalan yang terus menerus dikaji dan ditarik pada sisi aksiologi pengetahuan. Apa yang kemudian menjadi *urgent* untuk dipikirkan justru terletak pada bagaimana bahasa menjadi keseharian yang kasat, nyata, sekaligus operatif. Persoalan tersebut yang seringkali terpinggirkan dalam kebutuhan praktis akademisi. Dimulai dari konsep kebahasaan inilah bahasa menjadi kabur atau lebih tepatnya dikaburkan fungsi sosialnya.

Dalam konteks historis, bahasa dirujuk pada persoalan materialitas yang tersusun secara ideologis. Pengertian yang membawa pada bahasa sebagai instrumen kekuasaan. Tatapi siapa dan bagaimana kekuasaan itu beroperasi diatas dan atau melalui bahasa? Dalam mengelaborasinya perlu kiranya melihat pada konteks-konteks yang lebih material dan empiris. Dalam arah penulisan ini peneliti melihat pada praktik kebahasaan dan pembahasaan realitas yang dibingkai secara diskursif pada ruang-ruang kultural *enclave*.

Ruang kultural *enclave* menjadi titik awal untuk menarik garis dan menghadapkannya pada sirkum kekuasaan yang terpusat sekaligus

dipusatkan. *Enclave* dikonstruksikan sebagai ruang sosiokultural yang dibentuk dalam relasi ekonomi-politik. Ruang tersebut sengaja dibentuk dan dipisahkan untuk melihat kontrol kekuasaan yang mengoperasionalkannya.

Max Lane menempatkan *enclave* sebagai ruang yang dipisahkan dan dibentuk oleh rezim kolonial dan sekaligus menjadi ruang yang secara sosiokultural menjadi titik kekuatan politik. Asumsi yang dibangun adalah relasi pembentukan negara bangsa yang terpusat pada peradapan Eropa dan menyebar pada ruang-ruang negara kolonial hingga pada titik penyuaaran arti kedaulatan bernegara. Persoalan yang secara dualistik mengandaikan adanya bentuk kesadaran pada subjek kolonial untuk menempatkan dirinya pada relasi kolonialistik atau menempatkan dirinya sebagai subjek yang didominasi.

Enclave menandai kerangka berpikir untuk menempatkan ruang sosiokultural yang ada dan membayangi dominasi kaum penjajah. Kesadaran adanya dominasi bukanlah kesadaran yang harus didatangkan melalui bahasa asing tetapi terjadi dalam keadaan yang terbentuk melalui pengambilalihan hidup dan kesatuan kosmologis yang menggerakkan keseharian subjek kolonial. Untuk membentuk sebuah sistem sosial yang terus menerus menciptakan efek kontrol dan pengawasan, kaum penjajah menciptakan penguasaan pusat-pusat kebudayaan yang diposisikan merepresentasikan totalitas ruang kolonial. Dengan demikian, penundukan penguasa lokal menjadi tidak terhindarkan.

Penguasaan yang terbentuk bukanlah sistem yang tanpa celah dan tanpa keretakan. Dalam praktiknya kaum penjajah menempatkan dirinya sebagai yang dihadapkan pada dialektika kesadaran subjek kolonial. Di sisi lain, keberadaan kaum penjajah mengandaikan adanya semesta diskursus praktik penjajahan yang membentuk pluralitas wacana dan moralitas tentang bagaimana menempatkan subjek kolonial. Pluralitas ini menandai adanya kedekatan antara wacana penjajahan dengan praktik kolonialitas yang berujung pada kemunculan ragam subjektivitas, baik dari subjek kolonial maupun

subjek penjajah yang tidak hanya berjalan secara dominatif tetapi berjalan secara diskursif dan membangun praktik pembebasan.

Dualitas struktur yang dibentuk menandai adanya kuasa kolonialitas untuk mengontrol dan mengawasi subjek kolonial dengan mengintegrasikan sistem barat yang dominatif dan sistem kekuasaan timur yang dibangun melalui relasi feodal. Konsekuensi dari hal tersebut menegaskan adanya ruang kultural *enclave* yang berada dalam relasi kekuasaan dan sistem diskursif yang memarginalkannya. Kemunculan subjek kolonial dibatasi dan dikategorikan kedalam kekuatan produktif yang dapat memperkuat posisi kaum penjajah dengan mengabsorpsi struktur sosial kedalam bahasa kekuasaan dan mengintegrasikan praktik kultural menjadi relasi produksi.

Pada ranah pertarungan dualitas struktur yang terbentuk di wilayah kolonial, subjektivitas yang muncul dikerangkai oleh ambivalensi subjektivitas, yakni pada bagaimana subjektivitas yang dipraktikkan dibentuk melalui peleburan diri dalam sirkularitas diskursif. Pada titik tersebut, persoalan timur dan barat dibentuk secara komplementer untuk mengatakan dan membahasakan relasi sosial yang berada dihadapan subjek kolonial. Dalam kajian indonesianis isu tersebut direpresentasikan oleh kaum terpelajar yang mampu membaca dan menuliskan realitas yang dialami oleh mereka di wilayah kulturalnya.

Pembentukan instrumen ke/pembahasan menjadi strategi utama yang mampu menarik garis batas antara penjajah dan subjek kolonial. Pada titik ini bahasa menjadi instrumen perlawanan yang ditata pada regularitas kuasa kolonial. Maier menyusun argumentasi tentang pendisiplinan atau penataan bahasa yang dikaitkan dengan kebutuhan material kolonial untuk meniadakan dan memasukan lokalitas bahasa menjadi yang dapat bertemu didalam sebuah sistem ekonomi. Pengertian yang memungkinkan sistem kolonial untuk tidak hanya menyusun sebuah skema kebahasaan yang mampu meminggirkan ruang kebahasaan *enclave* tetapi mampu menyusun skema pergerakan moralitas bahasa pada yang terpusat, situasi yang dinamai sebagai kemunculan *Polyglossia*.

Polyglossia: Metanarasi Kehadiran Elite

Yang tersisa kemudian adalah jejak-jejak bahasa yang berujung pada peniadaan lokalitas. Dalam kajian yang dimulai Anderson, kondisi ruang kolonialitas yang terbentuk dalam ruang reproduksi pengetahuan dan bahasa menghendaki sebuah sistem bahasa yang mampu bermain, menyerap dan menyusupi kesadaran subjek kolonial. Maksudnya, sebetuk kesadaran yang diformulasikan dari dan melalui penataan yang dominatif menjadi sebetuk narasi kesadaran subjek yang terepresi dan membangun fantasi revolusioner. Pada titik ini Anderson menempatkan kaum muda dan terpelajar sebagai penggerak revolusi kesadaran. Situasi yang menghantarkan pembentukan narasi elite dalam pembentukan nasionalitas. Namun, pengertian elite bukan hanya berdasar pada sebetuk karakter sosial subjek yang menyejarah dalam ketertundukan pada kolonialitas. Dalam kerangka ini elite menjadi subjek kolonial yang membalik keadaan menjadi penundukan.

Elite yang dibentuk berjalan melalui penguasaan instrumen dalam sistem relasi kerja ketika posisi sosial yang dibentuk penjajah menempatkan elite lokal sebagai pengganti dan penghubung dengan massa. Sebuah sistem yang mengharuskan elite berada pada kontrol dan keterhubungan langsung dengan reproduksi kondisi kolonial. Mereka bekerja melalui penataan bahasa pengetahuan dan aplikasi teknis mekanisasi produksi, baik dari segi birokrasi maupun pada stragnasi dan naturalitas penjajahan. Dengan bahasa lain, reposisi elitisme yang tersusun melalui sistem feodal mampu diubah menjadi sistem yang berdasar pada ketergantungan mode produksi kolonial.

Memercayai kaum muda terpelajar dan persebaran teknologi mekanis menjadi bagian yang diposisikan penting oleh Anderson, terlebih pada bagaimana kemampuan kaum muda dalam memobilisasi massa. Hal yang kemudian menjadi problematik ialah pada ruang translasi kesadaran melalui bahasa. Ketika dikehendaki adanya sistem bahasa yang menandai kesadaran akan bangsa, rujukan yang terus menerus diulang ialah Sumpah Pemuda yang meneguhkan

adanya dualitas dominatif pada perbedaan kultural dalam ruang-ruang lokalitas. Pengakuan narasi elitis yang disuarakan kaum muda terpelajar menempatkan bahasa Indonesia sebagai yang mampu menghubungkan jejaring lokalitas dan di saat yang bersamaan menjadi instrumen perlawanan.

Kemunculan bahasa Indonesia sebagai instrumen bukan hanya meneguhkan posisi *enclave* dan pemusatan perlawanan dengan memalik *polyglossia* bentukan sistem kolonial. Di saat bersamaan, peneguhan stratifikasi sosial tampak pada kemapanan sistem administrasi dan birokrasi yang disusun untuk menggerakkan mode produksi kolonial. Cukup menarik ketika struktur sosial yang dikembangkan melalui sistem kolonial dipergunakan dan dipertahankan dalam sistem politik bernegara sampai dengan detik ini. Penelitian Geertz yang kemudian dipertegas oleh Max Lane, Caldwell dan Utrecht memosisikan Indonesia sebagai persoalan yang terbentuk melalui kategorisasi struktur sosial dan reproduksi kelas sosial yang secara masif dijalankan oleh negara.

Keretakan Represi: Praktik Bahasa Nasional dan Kembalinya Ruang Kebahasaan *Enclave*

Melihat konteks yang telah didiskusikan di atas, penelitian ini menempatkan Jember dan Banyuwangi sebagai ruang kajian. Perkembangan wilayah Jember yang dirujuk melalui konsep Pandhalungan menjadi menarik untuk dibicarakan. Terlebih karena konsepsi tersebut berujung pada pembentukan imajinasi teoretis karakter subjek yang tidak berakar dan mengembangkan seperangkat instrumen dan sistem budaya yang pragmatis. Dalam kerangka berpikir ini Jember diasumsikan menjadi wilayah yang dipisahkan oleh karakter kebudayaan Jawa dan Madura. Oleh karena itu, tidak lagi dapat dirujuk pada budaya Jawa dan Madura sebagaimana yang ada di daerah Jawa dengan karakter Mataraman dan Madura yang berada di Pulau Madura. Kondisi tersebut menjadi berbeda dari yang ada dan terjadi pada kehidupan sehari-hari di kota Jember.

Sebagai contoh pada segi kebahasaan atau dalam konteks sosiolinguistik yang secara kultural tampil dalam dimensi dialogisnya. Jember bukan hanya menjadi wilayah yang dihidupi secara kebahasaan sebagai yang egaliter atau yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai bahasa *ngoko*. Jember berkembang menjadi wilayah dinamis dengan karakter *exotropis* atau yang secara kultural menjadi subjek dalam keruangan budaya dan kesejarahannya yang dialogis, menjadi dan terus berkembang. Sebagaimana kemunculan varian bahasa lisan keseharian warga Jember, yang dibentuk oleh karakter budaya, ruang kebahasaan, dan pendidikan.

Berubahnya karakter subjek kebudayaan atau yang dalam konteks ini sebagai karakter warga Jember tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kota Jember yang melekat pada kehadiran yang lain dan membentuk karakter hibridasi. Jember dahulu dibayangkan sebagai bagian dari perluasan mode produksi agraris kolonialistik yang secara langsung menghadapkan Jember sebagai keruangan yang dikerangkai oleh semangat kapitalisme. Konsekuensinya tidak lain adalah terbentuknya dinamika sosiokultural yang bergerak secara cair dengan konteks-konteks yang melekat pada artikulasi warga kota Jember. Dengan demikian, bayangan tentang Jember yang dihuni oleh subjek yang berkarakter tunggal dan statis menjadi sangat berbeda dengan realitas keseharian warga kota Jember. Menjadi penting kemudian untuk merefleksikan siapa, apa, dan bagaimana artikulasi kebudayaan yang hadir menjadi bagian dari perbedaan kultural yang tidak hanya berakar pada pluralitas tetapi hendak diletakkan pada perbedaan yang tersusun secara formatif sebagai yang berkarakter nonlokal.

Praktik budaya yang terjadi di Jember merupakan bentuk lompatan kultural dengan mengimajinasikan tontonan dan arak-arakan massa. Tanpa mempersoalkan kulturalitas lokal, Jember menjadi ruang penyemaian semangat yang menolak terpaku pada stagnasi kultur dan meledakkan memori dalam sebuah karnaval. Pengakuan adanya bentuk formasi kultural Jember yang secara nasional menjadi pembeda mampu menginspirasi praktik kultural di wilayah lain. Banyuwangi merupakan teritorial paling ujung Timur Pulau Jawa

yang kaya tradisi spiritual dan kesenian daerah. Namun, kebudayaan tersebut di beberapa bagian menyimpan narasi berdarah. Kepentingan politik Orde Baru merekonstruksi kebudayaan Banyuwangi sebagai yang sesat dan menyimpang mengatasnamakan stabilitas politik dan agama. Peristiwa yang pernah hangat didiskusikan adalah tragedi santet Banyuwangi dan lagu “Genjer-genjer”. Penghancuran tradisi Banyuwangi dipropagandakan melalui *stereotype* dan aksi. Santet Banyuwangi dianggap sebagai ilmu hitam yang menyimpang dan mengancam kehidupan warga negara sehingga melalui klaim tersebut pembunuhan dan penghilangan orang-orang yang dianggap dukun santet memperoleh “pengabsahan” atau “legalitas”. Sedangkan lagu Genjer-genjer ditetapkan sebagai lagu “haram” yang dibelokkan sebagai lagu PKI.

Praktik kultural yang terbentuk dan menyimpan memori kekerasan merupakan bagian dari bagaimana negara meneguhkan superioritasnya pada persoalan lokalitas. Jember dan Banyuwangi menjadi salah satu dari banyak kasus yang mampu merepresentasikan praktik kebijakan negara atas budaya dan bahasa. Banyuwangi menjadi tempat peniadaan kultur Using dengan stigmatisasi dan pembungkaman narasi *folk culture* yang didasari oleh semangat agraris. Banyuwangi menjadi saksi dari praktik kekerasan budaya yang hari ini mencoba membangkitkan asal-usul kulturalnya sebagai yang berorientasi Global-lokal. Di sisi lain, kesadaran budaya lokal menjadi kontradiktif ketika tampilan dan ritualitasnya dipertontonkan dalam narasi sintagmatiknya: “*Nak Tuntunan didhadekne Tontonan, Lah Tontonan wis dadi Tuntunan*” tampak pada agenda elite lokal dalam menempatkan artikulasi lokalitas masyarakat Using.

Jember menjadi persoalan justru ketika ketiadaan asal-usul kultural yang mampu mendominasi dan total dalam setiap ruang praktik kebudayaan kemudian berujung pada lokalitas yang tersebar melalui preferensi kultur setempat, berujung pada kehadiran Jawa dan Madura yang ditampakkan menjadi pusat pertarungan kebudayaan. Pada titik ini, Jember menjadi ruang yang mampu meniadakan suara yang lain karena diabsorpsi ke dalam pertarungan *Pandhalunganisme*

yang mengandaikan adanya relasi kultural Jawa dan Madura sebagai kultur yang mendasari kompleksitas praktik kulturalnya. Pada pembagian ruang budaya Jawa misalnya, menempatkan Jawa sebagai preferensi utama dalam membayangkan bentuk artikulasi kulturalnya dan begitu juga sebaliknya.

Sementara Banyuwangi yang kemudian mengembangkan sebuah sistem festival berorientasi etnisitas berhadapan dengan tampilnya akar kultural Using yang mencari legitimasi kultural melalui tontonan massal. Keberhasilan menciptakan lokalitas yang berorientasi global menunjukkan adanya kontestasi lokalitas. Hal ini ditandai dengan diformulasikannya ritual adat yang berdasar pada sistem agraris dan terbentuk melalui sistem feodal, pelak menjadi taktik struktur sosial tradisional untuk mampu tampil pada sistem politik yang berorientasi pada birokrasi dan ekonomi jasa. Sebuah posisi yang menghendaki adanya peniadaan autentisitas dan berujung pada kompromi kultural elite bagi ruang kehadirannya. Sementara birokrasi lokal menjadi katalis yang mampu tampil sebagai determinan kehadiran yang lokal.

Menyoal keduanya, Jember dan Banyuwangi menghantarkan pada pembacaan posisi negara dengan sistem reproduksi kuasa dan budaya dalam membentuk dan mengkerangkai lokalitas. Jones menengarai adanya posisi negara yang secara sistematis menempatkan lokalitas budaya sebagai yang terintegrasi pada kepentingan ideologi negara khususnya pada konsep pembangunan yang menjadi agenda strategis orde baru dan bahasa menjadi instrumen penghubung dalam menempatkan budaya lokal dengan gerak pembangunan. Yang menarik ialah penempatan bahasa Indonesia sebagai agenda strategi *historical lobotomy*. Secara konseptual Wibisono menarasikan *historical lobotomy* ke dalam dua pengertian, yakni sebagai kebuntetan dan kehampaan ruang kesejarahan yang direpresentasikan melalui politik kebahasaan nasional. Pengertian yang berkonsekuensi pada bagaimana subjek pascakolonial memosisikan dirinya kedalam arus sejarah kekinian tanpa mengerti dan menempatkan dirinya dalam ruang dialektika kesejarahan sehingga kesadaran yang terbentuk diformasikan pada kekinian yang dikerangkai oleh semangat narsistik

dan *overindividual*. Dalam praktiknya, subjek tidak lagi mempersoalkan asal usul sejarah dan bahasa melainkan pada kekinian yang dibentuk oleh diskursus peneguhan diri dalam membalik inferioritas sisa-sisa kolonial.

Kekinian dalam Bingkai (Bahasa) Postmodernis: Menyemai Keretakan Praktik *Polyglossia*

Menempatkan Jawa dengan kompleksitas kultural menjadi penting untuk memosisikannya dalam ruang modernitas yang berkonsekuensi pada persoalan kekinian. Dalam kajian Mulder hal tersebut menjadi penanda hadirnya keretakan atau krisis konsep Jawa, sebagaimana dikonsepsikan oleh Greetz ataupun Anderson. Sementara dalam perkembangannya, Jawa tidak lagi menjadi sebetuk praktik kultural yang mampu lepas dari kehadiran negara dengan instrumentalitas teknis-teknologis yang membingkai hari ini. Konteksnya dimulai dari penjejaringan pada sistem kelistrikan yang menandai keterintegrasi ruang kultural dan permainan sistem teknologi berbasis internet yaitu sebuah era yang menandai kehadiran postmodernis dan sistem kapitalisme lanjut. Dalam kapitalisme lanjut, menurut istilah Jameson, wajah pengetahuan menjadi semakin kompleks dengan kehadiran teknologi. Dalam pandangan Lyotard, kedatangan komputer memiliki konsekuensi pada pembentukan pengetahuan dalam logika hegemoni komputerisasi. Dengan demikian pengetahuan memiliki sistem bahasa baru yang terkode melalui bahasa komputer dan menjadi universal. Hal ini terus mengacu pada peran teknologi yang semakin lekat dengan kehadiran industri dan kapitalisme.

Sebelum menuju pada apa yang dimaksud oleh Lyotard tentang permainan bahasa dan metodenya, perlu diingat sumbangsih pemikiran struktural bahasa Ferdinand de Saussure terlebih dahulu. Dalam bukunya, *Pengantar Linguistik Umum*, Saussure mengemukakan bahwa bahasa mempunyai tiga tingkatan yang dibentuk selama bahasa digunakan, yaitu *parole*, *langue*, dan *langage*. Dalam penggunaannya, *parole* adalah yang paling dekat dengan subjek karena melekat di

dalamnya ciri khas fonetik sebagai ikatan dan persebaran geografis beragam etnis. Sebagai bentuk resmi dalam perumusan penggunaan bahasa, *langage* merupakan aturan formal yang menjadi penyeragam fonetis dan bersifat universal karena merupakan sistem besar bahasa yang dapat digunakan secara umum oleh manusia. *Langage* adalah sistem yang dalam pemikiran Saussure adalah sistem besar yang meliputi *parole* dan *langue*. Sementara *langue* adalah sistem bahasa yang berada pada tataran aturan baku dalam suatu komunitas masyarakat tertentu dengan tipe dan aturan kesepakatan tertentu. *Langue* lebih spesifik daripada *langage* dan lebih universal daripada *parole*.

Perumusan tersebut menjadi dasar acuan yang kemudian digunakan oleh teoretisi lain untuk mengembangkan sistem bahasa dan implementasi konteks sosial linguistiknya. Dan dalam perkembangan tersebut, banyak kritik ditujukan pada Saussure yang tidak melihat beroperasinya kekuasaan dalam struktur pengetahuan berbahasa, semisal Roland Barthes dan C. S. Pierce. Logika bahasa Saussure dianggap mengabaikan ideologi yang bekerja dan mendukung arbitrase tanda sehingga membentuk normalisasi bahasa. Pada kritiknya, baik Barthes dan Pierce menyerang sistem tanda Saussure melalui perspektif yang berbeda, mitologi dan logika formal tentang tanda. Kritik terhadap Saussure tersebut membuka jalan terhadap dekonstruksi tanda dan kode bahasa sehingga menghasilkan makna yang tidak lagi tunggal dan terbuka. Mengacu pada gagasan tersebut, permainan bahasa Lyotard dijelaskan sebagai upaya penghancuran narasi besar yang bersembunyi dibalik kekuasaan dan pengetahuan sistemik bahasa.

Menurut Lechte, permainan bahasa menyinyalir bahwa tidak ada konsep atau teori yang dapat memadai untuk menangkap bahasa dalam totalitasnya. Dengan demikian, *grand* naratif tidak dapat lagi dipercaya karena juga merupakan permainan bahasa dimana *grand* naratif sendiri merupakan bagian dari multiplisitas permainan bahasa. Selanjutnya, Lechte mengemukakan bahwa *Lyotard has written of speculative discourse as a language game – a game with specific rules which can be analysed in terms of the way statements should be linked to each other.*

Dalam permainan bahasa, Lyotard menekankan pada fakta bahasa dan khususnya pada aspek pragmatismenya.

Pragmatis menurut Lyotard dilihat sebagai upaya pengungkapan kondisi dengan sifat denotatif dengan memperhatikan tiga elemen, si penyampainya, si penerimanya, dan referennya. Lebih jauh, Lyotard memperjelas bahwa si penyampai diposisikan sebagai orang yang mengetahui, si penerima sebagai yang harus menerima atau menolak, sedangkan referen adalah sesuatu yang diidentifikasi dan diekspresikan secara tepat melalui pernyataan yang mengacunya. Dalam gambarannya, posisi penyampai, penerima dan referen saling bertautan sehingga menghasilkan efek preskripsi pragmatis yang mengubah kedudukan penerima dan referen, sementara penyampai diposisikan memiliki otoritas. Singkatnya, Lyotard mengemukakan bahwa suatu ungkapan denotatif menentukan posisi penyampai yang berefek pada penerima, dan referen. Sebagai contoh, dalam suatu pernyataan atau wawancara terdapat ungkapan denotasi “universitas dibuka”. Dalam hal ini menggambarkan bahwa penyampai adalah dekan atau rektor –yakni ia diberi otoritas untuk membuat pernyataan semacam itu- hanya sejauh saat ia dapat memberi efek secara langsung pada referen (universitas) dan si penerima (staf universitas). Pada bagian ini Lyotard menunjukkan berjalannya konsep performatif.

Lyotard merujuk permainan bahasa sebagai konsep yang diperkenalkan oleh Ludwig Wittgenstein. Bagi Lyotard, permainan bahasa merupakan berbagai kategori ungkapan dapat didefinisikan dalam ketentuan aturan yang mencirikan sifat-sifat dan kegunaannya yang dapat diterapkan –persis sama seperti permainan catur yang dibatasi oleh seperangkat aturan yang menetapkan sifat dari masing-masing biji caturnya, dengan kata lain, cara yang layak untuk memindahkan biji catur tersebut. Wittgenstein yang dirujuk Lyotard menjelaskan konsep permainan bahasa sebagai kompleksitas dari nama-nama untuk menyebut suatu kondisi. Disebut sebagai permainan bahasa karena dalam menyatakan suatu kondisi dengan bidang yang kompleks tidak dapat diselesaikan dengan penyebutan nama-nama itu karena deskripsi yang kemudian hadir dalam nama dan kata

tidaklah mencukupi. Wittgenstein mencontohkan sebuah bidang datar atau kotak yang terdiri atas warna merah (M), hijau (I), putih (P) dan hitam (H) dan bidang yang tidak berwarna dengan membentuk suatu kalimat berdasarkan urutan nomor ke kanan 1,2,3,4, dan seterusnya. Kalimat yang tersusun misalnya MMHIIIMPP. Kalimat tersebut terdiri atas nama-nama yang kompleks. Konsep kompleks sendiri dapat dijabarkan lebih luas lagi dengan melihat dan membandingkan bahwa area yang lebih kecil dapat dikatakan adalah komposisi area yang lebih luas dan area lainnya menguranginya.

Lyotard merujuk konsep Austin dan Wittgenstein untuk menjelaskan cara kerja permainan bahasa untuk mendekonstruksi narasi besar. Menurut Lyotard

perlu membuat pengamatan pada permainan bahasa dengan cara, pertama, aturan main tidak dengan sendirinya membawa legitimasi, tetapi merupakan obyek kontrak yang secara eksplisit atau tidak di antara para pemainnya (yang tak perlu dikatakan kalau para pemainnya yang menciptakan peraturan). Kedua, jika tak ada aturan, maka tak akan ada permainan, dimana modifikasi yang sangat kecil dari salah satu aturan merubah sifat permainan, dimana “perpindahan” atau ungkapan yang tidak memuaskan aturan tersebut dihilangkan dari permainan yang mereka tentukan. Ketiga, adalah apa yang disebut: setiap ungkapan harus dianggap sebagai suatu “perpindahan” di dalam permainan.

Dengan demikian, Lyotard melihat metode permainan bahasa sebagai seni atau kecakapan berbicara yang perlu jeli menempatkan posisi dan tindak perkataan. Berbicara diasumsikan sebagai medan pertempuran yang sekaligus mencari kesenangan. Disebut permainan karena memerlukan gerak dinamis pengaturan strategi bertutur dengan memindahkan kata atau ungkapan. Lyotard menyebut kemenangan permainan sebagai agonistik bahasa dengan kesenangan yang ditimbulkan dari munculnya penemuan sebagai gangguan bahasa yang lambat laun berevolusi pada tingkat *parole* (ujaran) dan menjadi bahasa yang dapat diterima.

Pada konteks aturan permainan bahasa, Lyotard kembali merujuk pada argumen Wittgenstein tentang *to derive* (mengambil dari yang asli –pen). Konsep tersebut bagi Wittgenstein menimbulkan persoalan orisinalitas, semisal ketika mencontohkan cara orang melafalkan (mengeja) yang melibatkan suara (dalam istilah Saussure dimaksud sebagai fonem) ketika membaca dari teks atau tulisan. Bagaimana fonem membentuk kekhasan dan berlaku partikular bagi pengucap. Artinya, fonem tersebut merupakan aturan atas pengucapan yang kemudian disesuaikan dengan lingkungan tertentu. Pada lingkungan yang berbeda berlaku fonem yang berbeda.

Selain itu, Wittgenstein mengacu pada munculnya memori atas bunyi-bunyi yang berkaitan dengan pengucapan. Cara kerja ingatan atau memori menempatkan pengucapan kita yang tidak selalu merujuk pada asal suara tetapi pada bagaimana kita membayangkan dan mengonstruksi lafal tersebut. Namun Wittgenstein mengungkapkan bahwa kasus tersebut berlaku pada bentuk kata, huruf atau tanda yang tidak pernah kita dengar pelafalannya sebelumnya. Perbedaan fonem dan cara kerja ingatan dalam pembentukan pelafalan menjadi kunci munculnya kesempatan yang luas untuk permainan bahasa. Terutama jika dilihat dari berlakunya aturan fonem yang tidak mengikat secara general. Pada konteks ini, Lyotard melihat celah kehancuran *grand naratif* yang menjadi legitimasi ilmu pengetahuan atau sains.

Pada konteks rezim penguasa, sebagai contoh masa Orde Baru, bahasa menjadi struktur represif berupa aturan ejaan yang disempurnakan (EYD) dan bersifat baku. Dalam hal tersebut, aturan yang rigid dan general menenyapkan yang *parole* sebagai entitas teritori yang dimarginalkan. Hal ini terlihat dari penyeragaman pelafalan ungkapan dalam berbahasa. Contoh eksplisit adalah tren bahasa yang digunakan oleh rezim Suharto pada masa Orde Baru yang identik dengan pelafalan “Ken” [kən] dalam pengucapan kata yang berakhiran “Kan” seperti “Menerangkan” berubah menjadi “Menerangkan”, dan bentuk lain yang setipe. Legitimasi masa penguasaan dan kekuasaan dikonstruksi pada bentuk pengucapan atau pelafalan bunyi yang “Jawasentris” dalam versi Suharto sebagai bagian bahasa yang

dinormalisasi menjadi identitas kekuasaan. Dalam parodi masyarakat etnis atau adat, ketidakmampuan “menyanggupi” aturan kebahasaan dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Namun di sisi lain, bergerak sebagai parodi yang sekaligus mengejek bentuk kekuasaan tersebut karena ketidakmampuannya mengadaptasi yang partikular. Dengan demikian penting melihat bagian yang partikular ini sebagai *mockery*, sebagai identitas yang marginal.

Permainan bahasa timbul ketika muncul parodi yang meletakkan konteks plesetan kata atau makna untuk mendistorsi legitimasi bahasa yang sudah mapan. Bentuk perlawanan tersebut kemudian muncul salah satunya melalui bahasa gaul yang disebut *slang* dan turunannya, yaitu *cant* (*slang* rahasia). Bahasa gaul sendiri mengalami perkembangan dari mulai tahun 1940-an sampai sekarang. Menurut Widyatmoko, tahun 1940-an bahasa gaul hadir dengan mengganti suku kata terakhir menjadi *-se*, seperti kata “genit” menjadi “gense” dan mampu bertahan cukup lama hingga tahun 1980-an dengan mengalami perkembangan munculnya bahasa *prokem* yang dipakai oleh preman di Jakarta. Lebih lanjut, Widyatmoko menulis bahwa dalam perkembangan selanjutnya muncul bahasa yang biasa dipakai oleh kaum homoseksual, semisal “*capcus*” yang artinya “*bergegas*” dan masih dipakai oleh kaum muda saat ini.

Fenomena bahasa kekinian yang masih termasuk rumpun bahasa gaul adalah bahasa *alay*. Bahasa *alay* beredar cukup luas dan menjadi populer terutama di kalangan kaum muda sejak beberapa tahun terakhir. *Alay* berasal dari kata *Anak Layangan* yang dimaksudkan sebagai anak labil, gampang tertarik arus pergaulan dan suka ikut-ikutan. Identik juga dengan berlebihan atau melebih-lebihkan. Pada konteks struktur tulisan kata dan fonemnya, bahasa *alay* bermain pada huruf vokal dan konsonan dalam satu kata. Sebagai contoh adalah kata “*semangat*” yang berganti menjadi “*cemungudh*” dan dapat berubah lagi sesuai penggunaannya seperti kata “*semangka*” yang maksudnya adalah “*semangat kaka*”. Contoh lain adalah “*beud*” yang diartikan “*banget*”.

Menarik untuk dilihat bahwa hadirnya permainan bahasa muncul sebagai bentuk resistensi kultural yang tampil dalam fonem dan *parole*. Namun posisi bahasa gaul perlu dicermati sebagai bentuk perkembangan bahasa yang merepresentasikan dua hal. Pertama, karakteristik kelas dan kultur yang mendukungnya sehingga dilihat sebagai yang ideologis. Kedua sebagai identitas. Artinya, dengan menelusuri historisitas kultural bahasa dapat ditemukan bagaimana bahasa tertentu membentuk identitas kultural sekaligus resistensi yang dioperasionalkan. Pada konteks tersebut, bahasa gaul yang dipraktikkan oleh kaum homoseksual diasumsikan mengusung misi penegasan pengakuan identitas mereka oleh penggunanya. Contohnya penggunaannya seperti kata “*eke*” untuk “*aku*”, “*endang*” yang maksudnya “*anak*” dan “*begindang*” untuk kata “*begitu*”. Konteks sosial historis ini yang tidak dapat dipisahkan ketika menyelidiki asal mula bahasa gaul tertentu.

Dengan demikian, perayaan partikularisme bahasa menyediakan jalan bagi kemunculan narasi kecil. Begitu juga dalam kasus kemunculan bahasa *prokem* yang digunakan oleh preman-preman di Jakarta. Dalam komunitas tertentu terdapat aturan berbahasa yang mengikat penggunaannya dan menjadi komitmen bersama. Ikatan sosial kebahasaan adalah senjata yang ampuh untuk menyembunyikan “*rahasia atau hidden agenda*” suatu komunitas atau kultur tertentu selain berfungsi sebagai legitimasi identitas. Bahasa Arek Malang misalnya, menggunakan pembacaan terbalik dalam kata-kata yang dirangkai dalam sebuah kalimat. “*Arek Malang*” sendiri sangat populer sebagai “*Kera Ngalam*”. Contoh lain kata yang digunakan termasuk “*kunam*” untuk “*manuk*” (bahasa Jawa, burung dalam bahasa Indonesia) dan “*liwakan*” untuk “*walikan*” (kebalikan dalam bahasa Indonesia), “*kadit*” artinya “*tidak*” dan “*uklam-uklam*” maksudnya “*mlaku-mlaku*” (jalan-jalan dalam bahasa Indonesia). Di Surabaya muncul bahasa “*Maling*” (Pencuri) yang dipakai kalangan tertentu dengan menggunakan susunan kata yang lebih rumit, terkode dengan rapi sehingga bahasa ini tidak tersebar luas. Misalnya untuk menyebut seseorang yang bernama Heri, perlu menyisipkan suku

kata tertentu sehingga penyebutannya menjadi “Helarsi” dan contoh sebuah kalimatnya seperti “*kon ikarsu soparso, koq ghawarse gayae uwong malangsar*” (dalam bahasa Indonesia berbunyi, kamu itu siapa, koq menggunakan gaya orang malang). Konsepsi *coding* dalam bahasa “Kera Ngalam” dan bahasa “Maling” merupakan praktik permainan bahasa Wittgenstein yang menggunakan teknik pembalikan dan sisipan.

Kemudian apakah bahasa gaul memulai titik historisitas tertentu? Metode permainan bahasa Lyotard yang menggabungkan logika pemikiran Wittgenstein dan Austin mampu mengondisikan konteks tersebut. Melalui pemikiran Lyotard dapat dipertimbangkan bahwa hadirnya bahasa gaul merupakan konsekuensi dari permainan bahasa melalui masyarakat yang terkomputerisasi. Bahasa yang bervariasi tersebut memiliki historisitas kemunculan yang berbeda sehingga narasi yang dihadirkan menjadi berbeda dan tidak berlaku umum. Berbagai narasi tersebut adalah bagian dari narasi kecil sebagai praktik permainan bahasa Lyotard. Sebagai bentuk identitas maupun resistensi (walaupun tidak semua bahasa gaul memiliki referen ini), peran *parole* dalam membentuk bahasa gaul mutlak diperlukan karena berhubungan dengan pelafalan fonem yang sangat kultural. Oleh sebab itu, *parole* berperan penting dalam kemunculan partikularisme tersebut, sebagai bentuk perayaan Lyotard atas matinya narasi besar.

Dalam pandangan Lechte permainan bahasa yang dimaksudkan oleh Lyotard mampu menerobos hegemoni legitimasi pengetahuan yang berkedok *grand naratif*. Argumen Lechte didasarkan pada proses riset yang didukung kemampuan teknologi yang menciptakan ruang teknokratis pengetahuan oleh ilmuwan yang kemudian melegitimasinya sebagai yang berlaku general. Permainan bahasa di satu pihak, tetap menjadi sisi catur yang akan tetap melanggengkan meta naratif yang menurut Lyotard, selama permainan tetap dimenangkan oleh pihak yang melegitimasi *grand naratif*. Namun, kesempatan bahwa melalui permainan bahasa akan ditemukan banyak tantangan dan kesenangan adalah cara Lyotard mengambil alih bentuk tatanan legitimasi itu sebagai yang tidak menutup sempurna karena masih dimungkinkannya arena pertempuran bahasa.

(Auto)Eksotisme: Menyoal Lokalitas bagi Sebuah Tawaran

Menafsirkan ulang Jawa dalam bingkai formasi budaya tentu tidak memungkinkan hanya memosisikannya sebagai representasi kebahasaan yang terpusat dalam institusionalisasi negara. Terlebih, dengan melekatkannya pada badan yang secara diskursif menata praktik kebahasaan dan meneguhkan legitimasi atas kebenaran dibalik bahasa. Max Lane merepresentasikan adanya pencarian bahasa yang secara massal mampu menyuarakan kebenaran dalam sebuah sumpah mahasiswa. Namun hal itupun masih berada pada persoalan tersendiri, yakni pada representasi subjek apa yang mampu menyuarakan kebenaran. Dalam konteks tersebut, Jawa menjadi seperangkat persoalan yang berpusat pada bagaimana sebuah bangsa Indonesia membentuk dirinya. Pemberton dalam pembacaan Shiraishi menjadi titik peneguhan Jawa sebagai sentrum ekonomi kultural. Secara tegas Pemberton mengonseptualisasikan Indonesia sebagai bentukan diskursus Kolonial-Jawa, yakni titik yang memungkinkan untuk dieksplorasi ulang terlebih pada bagaimana kajian tentang Indonesia dan Jawa berkuat pada persoalan keretakan arti sebuah Jawa.

Membicarakan Jawa sebagai sebuah sistem sosial kultural yang secara ekonomi politik dominan akan membawa pada cara berpikir yang menegaskan Jawa sebagai sebuah totalitas mutahir yang mampu menyerap sebuah perbedaan kebudayaan dan menatanya dalam ruang-ruang pembungkaman lokalitas. Hal ini tampak pada bagaimana hari ini geliat lokalitas menjadi kajian yang terus-menerus tampil dan menolak keadaan narasi dominan yang diasumsikan berpusat pada Jawa. Sementara itu, ketika memosisikan Jawa sebagai pusat pencarian yang autentik tidak dapat lagi dikenali. Yang artinya, Jawa hari inipun berada pada tarikan-tarikan wacana politik baik dari tingkatan yang paling pragmatik pada diri subjek maupun yang paling metafisik yakni pada tingkatan *cosmopolitanisme*. Hal itu seakan mampu mengarahkan konsepsi Jawa pada labirin pencarian yang secara simultan berubah dan terus bergerak dalam pondasi yang rapuh.

Kerapuhan ini dimulai dari penempatan pusat ke-Jawa-an yang secara kategoris berbasis pada feodalisme yang secara moralitas mampu dipertanyakan keberadaannya. Dalam konteks ini, kehadiran Jawa tidak dapat dipisahkan dari bagaimana Jawa ditampilkan oleh orang-orang yang secara kharismatik melegitimasi dirinya melalui trah leluhur sebagai penguasa Jawa. Kehadiran mereka bukan hanya menjadi ambivalensi pada dirinya tetapi mampu memisahkan dirinya dalam ruang-ruang spesifik tetapi dalam bentuk praktiknya hanya menjadi bentuk yang residual dari rezim kekuasaan klasik. Ketika menempatkan Jawa dalam bentuk migransi kultural akan berujung pada titik mana Jawa ini mampu dipertahankan. Jember dan Banyuwangi menandai persoalan tersebut dimana Jawa hanya direduksi pada praktik pedagogik tanpa moralitas yang material.

Jember tampil dalam pluralitas yang secara dominan dikonstruksikan berasal dari dualitas sistem budaya yang menandai adanya pembatasan Jawa yang dipraktikkan pada ranah akademik lalu melepaskan asal-usul kultural subjek. Artinya, subjek menjadi terkerangkai sebagai yang bermuatan lokal Jawa dan bahasa Jawa. Berbeda dengan Banyuwangi yang sampai hari ini secara militan mengembangkan sebuah penolakan atas Jawa sentris yang selama beberapa dekade merepresi artikulasi kultural Using. Dalam hal ini, pengakuan pada Jawa menjadi berbeda dalam referensi kultural yang dipraktikkan oleh pusat Jawa. Pada titik tersebut, meskipun mengakui sebagai yang berkarakter Jawa, Using menjadi sistem budaya yang secara taktis mampu membangun mitos atas dirinya dan mampu memformulasikan bahasa Using sebagai yang berbeda dengan Jawa.

Praktik kesadaran atas diri yang lokal dalam ruang subjek pasca kolonial dapat dirujuk pada kegagalan negara untuk menciptakan sistem yang tertata, terintegrasi dan terdisiplinkan sehingga secara produktif menciptakan subjek yang tertundukan dalam kerangka kuasa negara. Konsepsi Foucaultian menjadi penting pada titik ini. Yang artinya, ketika pragmatisme kebahasaan merujuk pada isu lokalitas, persoalan tersebut menjadi mungkin ketika subjektivitas yang diformulasikan dalam pengetahuan mampu memberikan ruang

bagi kemunculan subjek. Kemunculan subjek tidak lagi hanya dilihat sebagai subjektivitas yang secara autentik berada pada struktur paralogis tetapi menjadi subjek yang berada pada pusaran diskursus kebahasaan.

Simpulan

Diskusur kebahasaan yang ditampilkan menjadi penting ketika dilihat pada ruang-ruang kultural *enclave* yang menjadi tempat dari jangkauan terluar pendisiplinan dan ruang ledakan pendisiplinan bahasa. Di dalamnya, Jawa menjadi sebetuk sistem ekonomi kultural yang ditransformasikan secara praktis dan diskursif untuk membangun sistem kedaulatan budaya. Artinya, membangun strategi yang tidak lagi melulu berasal dari akar kultur menjadi bagian yang tidak terpisahkan di Jember dan Banyuwangi. Persoalan peneguhan budaya Jawa dan representasi bahasa tanpa adanya ruang material untuk menghadirkan kedaulatan ekonomi kultural akan berujung pada hal yang meninggikan yang tiada dan merendahkan yang ada, yaitu kekinian yang secara politik berada pada silang-sengkarut adat dan kesadaran pada identitas lokal.

Bagi penulis, Jawa bukan hanya persoalan yang moralis dan eksotis melainkan bagaimana mampu menempatkannya pada kekinian dan materialitas sistem ekonomi jasa. Artinya, ketika Jawa diletakkan pada aturan-aturan normatif dan meniadakan lokalitas yang justru secara produktif dapat menjadi preferensi keajaiban kultur *Jawa Enclave*, tentu menjadi menarik ketika memosisikan kekuatan diskursus lokalitas subjek pasca kolonial sebagaimana Saviliagno memosisikan Tango. (Auto)Eksotisme menjadi penanda konseptual dalam meledakkan subjektivitas yang terserak dalam migransi dan produktif dalam antipendisiplinan. (Auto)Eksotisme bukan hanya sebuah ruang-ruang kultural yang centang perenang tetapi merupakan ruang penolakan atas kehendak penataan lokalitas melalui suara kaum intelektual yang merepresentasikan kota dan kemapanan kultur. Persoalan tersebut yang saat ini menjadi penting untuk direfleksikan, khususnya pada

bagaimana sistem kultural yang hari ini tampil secara kontingensi pada sistem ekonomi jasa tidak memungkinkan lagi ditata secara birokratis, terlebih pada penguasaan yang lokal dan personal.

Dalam kasus bahasa Indonesia yang menandai kehadiran negara dengan seluruh aparatus ideologisnya, ternyata tidak mampu menahan ledakan subjektivitas yang menolak ditata secara total. Sementara membayangkan persoalan adat dan budaya lokal yang tidak lagi dapat ditemui keruangan lokalnya, tampak mengerikan ketika diposisikan sebagai instrumen politik lokal yang berorientasi pada pembangkitan kekuatan struktur legitimasi klasik. Menjadi Jawa bukan hanya mampu berbahasa Jawa atau yang *Njawani* tetapi lebih dari itu, menjadi Jawa ialah pada persoalan bagaimana merepresentasikan lokalitas yang secara diskursif dimampatkan dalam diskursus kekuasaan dominan. Situasi hari ini oleh Anderson ditempatkan sebagai keresahan-keresahan kaum terpelajar yang bertempat di pusat kebudayaan. Mereka mengetahui krisis dan jejaring peleburan budaya pada yang massal tetapi mereka mengambil langkah dengan merayakan lokalitas yang terintegrasi pada ruang-ruang *enclave*. Situasi inilah yang secara propagandis dibayangkan sebagai *djaman balik buwono* oleh Haji Misbach namun sebagai era dari ledakan waktu yang hadir dalam penyatuan paralelisme kesadaran diri yang berdaulat dalam semangat lokalitas.

Dengan konsep tersebut, lokalitas ke-Jawa-an, yang berkarakter migransi menjadi kekuatan yang mampu menjadi kekuatan produktif dalam membentuk eksotisasi subjek. Karenanya persebaran subjek Jawa dengan basis lokalitasnya dibayangkan mampu menumbuhkembangkan karakter lokal yang diinsepsi akar budaya Jawa dan dari karakter tersebut standarisasi Jawa menjadi bagian yang justru kontraproduktif di balik geliat dan desakan pengakuan akan kedaulatan budaya lokal di tengah pusaran budaya lokal-global atau lokalitas yang menglobal.

Daftar Pustaka

- Alatas, S.H. 1988. *Mitos Pribumi Malas: Citra Orang Jawa, Melayu dan Filipina dalam Kapitalisme Kolonial*. Jakarta: LP3ES.
- Austin, J.L. 1962. *How to Do Things With Word*. Great Britain: Oxford Universtity Press.
- Anderson, Benedict. 1990. *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Jakarta: Equinox Press.
- Anderson, Benedict. 1996. "Language, Fantasy, Revolution: Java 1900-1950". Dalam, Lev, Daniel and, McVay, Ruth (ed). *Making Indonesia: Essays on Modern Indonesia in Honor of George McT Kahin*. Intacha, New York: Cornell University Press.
- Anderson, Benedict. 2001. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Insist & Pustaka Pelajar.
- Bhabha, Homi. 2007. *The Location of Culture*. New York: Routledge.
- Bellamy, Richard (ed). 1994. *Gramsci Pre-Prison Writings*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Burhan, Arifin, Edy. 2006. "Pertumbuhan Kota Jember dan Munculnya Budaya Pandhalungan". Makalah dipresentasikan dalam Konferensi Nasional Sejarah VIII, di Jakarta Pada Bulan November 2006.
- Caldwell, Malcolm, dan Utrecht, Ernst. 2011. *Sejarah Alternatif Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Jaman Baroe dan Sayogo Institute.
- Farid, Hilmar. 2014. "Arus Balik Kebudayaan: Sejarah sebagai Kritik". Jakarta: Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta.
- Foucault, Michel. 1975. "The Eye of Power". Dalam Thomas Gora, Suzanne Guerlac, and, Lee Hildreth (Ed). *Schizo-Culture. Semiotext*. Vol III, No 2. Hlm. 6-19.
- Foucault, Michel. 1975. *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Yogyakarta: Bentang, 2002.

- Foulcher, Keith. 2008. *Sumpah Pemuda: Makna & Proses Penciptaan Simbol Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Greetz, Clifford. 1983. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hill, T, David., dan, Sen, Krishna. 2005. *The Internet in Indonesia's New Democracy*. Canada: Routledge.
- Hill, T, David., dan, Sen, Krishna. 2007. *Media, Culture and Politics in Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing.
- Herlambang, Wijaya. 2013. *Kekerasan Budaya Pasca 1965 Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Holquist, Michael. 2009. "The Role of Chronotope in Dialog". Dalam, Junefelt, Karim. dan, Nordin, Pia (Ed). *Proceedings From The Second International Interdisciplinary Conference on Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bahtin*. Sweden, Stockholm University, Departement of Scandinavia Languages. Hlm. 9-17.
- Jones, Ted. 2015. *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad Ke-20 Hingga Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor dan KITLV.
- Jurriëns, Edwin. 2006. *Ekspresi Lokal dalam Fenomena Global: Safafi Budaya dan Migrasi*. Jakarta, LP3ES dan KITLV.
- Junefelt, Karim. dan, Nordin, Pia (Ed). *Proceedings From The Second International Interdisciplinary Conference on Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bahtin*. Sweden, Stockholm University, Departement Of Scandinavia Languages.
- Lane, Max. 2014. *Unfinished Nation*. Yogyakarta: Penerbit Djaman Baroe.
- Lechte, John. 1994. *Fifty Key Contemporary Thinkers from Structuralism to Postmodernism*. London: Routledge.
- Lyotard, Jean-Francois. 2004. *Postmodernisme Krisis dan Masa Depan Pengetahuan*. Jakarta: Teraju.

- Maier, Hendrik, M, J. 1993. "From Heteroglossia to Polyglossia: The Creation of Malay and Dutch in The Indies". Cornell: Indonesia, Vol 56, Hlm. 37-66.
- Mulder, Niels. 1983. *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kulturil*. Jakarta: Gramedia.
- Raharjo, Christanto P. 2014. "Pendhalungan: Sebuah 'Periuk Besar' Masyarakat Multikultural". <http://www.Bpsnt-Jogja.Info/Bpsnt/Download/Pendhalungan.Pdf> Didownload Tanggal 1 April 2014, Pukul 10.00 Wib.
- Rosa, Dien Vidia. "Keberanian Menyisir Sejarah dan Kebudayaan dalam Bentang Timur-Barat". *Literasi Jurnal Ilmu-Ilmu Humaniora*. Volume 2 No. 2 Desember 2012. Hlm.. 232-238.
- Saussure, Ferdinand de. 1988. *Pengantar Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Saviliagno, Marta, E. 1995. *Tango and The Political Economy of Passion*. Oxford: Westview Press.
- Shiraishi, Saya, Sasaki. 2009. *Pahlawan-Pahlawan Belia: Keluarga Indonesia dalam Politik*. Jakarta: Nalar.
- Shiraishi, Takashi. 1996. "Rewiring The Indonesia State". Dalam, Lev, Daniel and, McVay, Ruth (ed). *Making Indonesia: Essays on Modern Indonesia in Honor of George McT Kahin*. Intacha, New York: Cornell University Press.
- Sutarto, Ayu., dan Yuwana, Sudikan, Setya, (Ed). *Pemetaan Kebudayaan di Propinsi Jawa Timur: Sebuah Upaya Pencarian Nilai-Nilai Positif*. Jember: Biro Mental Spiritual Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Kompyawisda.
- Thomas Gora, Suzanne Guerlac, and, Lee Hildreth (Ed). 1975. "Schizo-Culture". *Semiotext*. Vol III, No 2. Hlm. 6-19.
- Todorov, Tzvetan. 2013. *Dasar-Dasar Intertekstualitas: Pergulatan Mikhail Bakhtin Menuju Teori Sastra Terpadu*. Denpasar: CV Bali Media Adhikarsa.

- Wiyata, A, Latief. "Mencermati Kondisi Sosial Budaya Pengungsi Sampit di Kabupaten Jember". Makalah Seminar Seminar Kajian Konflik di Kalimantan. Diselenggarakan Oleh Lasema-Cnrs, France, Social Sciences for The Study of Conflict in Indonesia, Proyek Kerjasama Cnrs-Lipi, Jakarta 19 Maret 2002.
- Wertsch, James V. 2009. "Text and Dialogism in The Study of Collective Memory". Dalam, Junefelt, Karim. dan, Nordin, Pia (Ed). *Proceedings From The Second International Interdisciplinary Conference on Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bahtin*. Sweden, Stockholm University, Departement of Scandinavia Languages. Hlm. 31–38.
- Wibisono, Bambang. 2007. "Varian Bahasa Orang Madura di Jember dalam Komunikasi Lisan Tidak Resmi". *Bahasa dan Seni*. 35 (2). Hlm. 158–171.
- Wibisono, Joss. 2012. *Saling Silang Indonesia-Eropa: Dari Diktator, Musik, hingga Bahasa*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Wittgenstein, Ludwig. 1963. *Philosophical Investigations*. Great Britain: Basil Blacwell.
- Widyatmoko, Gideon. 2011. "Review *Kamus Bahasa Gaul* karya Debby Sahertian, B.Sc". Selengkapnya dapat dibaca di <http://lidahibu.com/2011/02/01/kamus-bahasa-gaul/>. Diakses tanggal 3 Juli 2014 pukul 10.00 WIB.
- Yuswidi, Hary. 2008. "Budaya Pendhalungan: Bentuk Multikulturalitas dan Budaya Antaretnik. Dalam Sutarto, Ayu., dan Yuwana, Sudikan, Setya, (Ed). *Pemetaan Kebudayaan di Propinsi Jawa Timur Sebuah Upaya Pencarian Nilai-Nilai Positif*. Jember: Biro Mental Spiritual Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Dan Kompyawisda. Hlm. 53–70.